Analisis Implementasi Akad Syirkah Mudharabah pada Franchise Kebab Turki Baba Rafi Buah Batu Menurut Fiqh Muamalah

Veliani Nur Fitri, Eva Misfah Bayuni, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

velianinurfitri@gmail.com, evambayuni@gmail.com, irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract—Syirkah mudharabah is a cooperative agreement that involves two or more people to manage capital and then turn it into a profitable business. This study aims to find out how the theory of syirkah mudharabah contracts in the perspective of fiqh muamalah, how the practice of syirkah mudharabah contracts in the Turkish Kebab Baba Rafi franchise business, Buah Batu Branch, and how to review fiqh muamalah on the implementation of the syirkah mudharabah contract at the Turki Baba Rafi Kebabs, Buah Batu Branch. The research method used is a qualitative approach. Data collection techniques used are documentation, observation, and interviews. The results of the research that has been carried out by researchers after being analyzed can be concluded as follows: The contract of syirkah mudharabah in fiqh muamalah is legal as long as the pillars are fulfilled, the conditions are in accordance with Islamic teachings. The practice of syirkah mudharabah contracts in the Kebab Turki Baba Rafi franchise business partnership for profit sharing using a payback period system where within a period of 1.8 years the Kebab Turki Baba Rafi fully benefits while the franchisee in that period only receives a return on capital. The analysis of fiqh muamalah on the implementation of syirkah mudharabah in the Kebab Turki Baba Rafi franchise business in the payback period system makes a discrepancy with the profit requirements applied in the mudharabah concept because of the inequality in profit sharing.

Keywords—*Shirkah mudharabah, Franchise, Muamalah Fiqh*

Abstrak—Syirkah mudharabah merupakan perikatan kerjasama yang menyertakan dua orang atau lebih untuk mengelola modal lalu dijadikan usaha yang menghasilkan keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana teori akad syirkah mudharabah dalam perspektif fiqh muamalah, bagaimana praktik akad syirkah mudharabah pada bisnis franchise Kebab Turki Baba Rafi Cabang Buah Batu, dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap implementasi akad syirkah mudharabah pada Kebab Turki Baba Rafi Cabang Buah Batu. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa, Akad syirkah mudharabah dalam fiqh muamalah hukumnya diperbolehkan asalkan terpenuhinya rukun, syarat yang sesuai dengan ajaran Islam. Praktik akad syirkah mudharabah pada kemitraan bisnis franchise Kebab Turki Baba Rafi untuk pembagian keuntungan menggunakan

sistem payback period yang mana dalam jangka waktu 1.8 tahun pihak Kebab Turki Baba Rafi sepenuhnya mendapatkan keuntungan sedangkan pihak franchise dalam jangka waktu tersebut hanya menerima pengembalian modal. Analisis fiqh muamalah terhadap implementasi syirkah mudharabah pada bisnis franchise Kebab Turki Baba Rafi dalam sistem payback periodnya membuat ketidaksesuaian dengan syarat keuntungan yang diterapkan dalam konsep mudharabah karena adanya ketidaksamaan dalam pembagian keuntungan.

Kata Kunci—*Syirkah Mudharabah, Franchise, Fiqh Muamalah*

I. PENDAHULUAN

Bagian hukum Islam yang mengatur tata cara kehidupan manusia dalam sehari-hari untuk suatu kepentingan material yang saling memberi manfaat satu sama lain disebut dengan muamalah. *Mudharabah* ini termasuk kategori *syirkah* atau kerjasama dengan cara bagi hasil yang menggerakkan antara pemilik modal dan pihak tertentu, yang berlandaskan kepercayaan (amanah). Secara istilah *mudharabah* yaitu akad kerja sama antara *shaihibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (yang mempunyai keahlian) untuk memproduksi harta tersebut. Dalam akad *mudharabah* pembagian hasilnya akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya apabila terjadi kerugian ditanggung oleh *shaihibul maal* kecuali kerugian tersebut dikarenakan kelalaian *mudharib*.

Praktek *syirkah* yang dilakukan oleh Kebab Turki Baba Rafi Cabang Buah Batu dalam pengeluaran modal seluruhnya ditanggung oleh *franchise*. Setelah modal diserahkan pada *franchisor*, pihak *franchisor* diberikan wewenang untuk mengelola modal tersebut sedangkan *franchise* tidak memiliki kewenangan penerobosan dalam hal apapun selain hak mengawasi untuk menjauhkan penyalahgunaan modal diluar rangkaian yang disetujui.

Pembagian keuntungan yang diterapkan dalam Kebab Turki Baba Rafi Cabang Buah Batu menggunakan sistem *payback period*. *Payback period* merupakan waktu untuk kembalinya modal menggunakan penghasilan bersih diterima dalam waktu 1.8 tahun diawal perjanjian yang telah disepakati. Pihak mitra Kebab Turki Baba Rafi menganggap bahwa modal *franchise* dalam waktu 1.8 tahun sudah

kembali padahal dalam sistem *payback period* terdapat ketidakjelasan mengenai keuntungan pengembalian modal tersebut karena setiap bulannya ialah bagi hasil sesuai nisbah yang disetujui bukan pengembalian modal.

Dalam tulisan ini akan meneliti mengenai bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap implementasi akad *syirkah mudharabah* pada kemitraan bisnis *franchise* Kebab Turki Baba Rafi Cabang Buah Batu. Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan mengenai teori akad *syirkah mudharabah* menurut fiqh muamalah.
2. Untuk mempelajari lebih dalam mengenai praktik akad *syirkah mudharabah* pada kemitraan bisnis *franchise* Kebab Turki Baba Rafi Cabang Buah Batu.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap implementasi akad *syirkah mudharabah* dalam kemitraan bisnis *franchise* Kebab Turki Baba Rafi Cabang Buah Batu.

II. LANDASAN TEORI

A. Waralaba (Franchise)

Waralaba yaitu perikatan kerjasama yang terikat kontrak atau perjanjian antara *franchisor* dengan *franchise* untuk mendistribusikan suatu produk atau jasa dan memberikan hak atas kekayaan intelektual seperti pemanfaatan merk dan lain sebagainya.

Menurut Asosiasi *Franchise* Indonesia definisi *franchise* merupakan penyaluran barang dan jasa terhadap konsumen akhir untuk mengembangkan bisnisnya dengan nama, brand, sistem dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam jangka waktu dan wilayah tertentu.

Perjanjian yang dilakukan bisnis *franchise* masuk kedalam akad, akad dalam bisnis Islam yaitu penghubung antara dua hal untuk mengikat suatu keinginan bersama suatu yang lain untuk menimbulkan adanya keharusan khusus yang sudah ditetapkan.

Menurut persepektif Islam bisnis *franchise* itu diperbolehkan asal tidak menyimpang dari ajaran-ajarannya karena pada dasarnya suatu perikatan tersebut sama halnya dengan *syirkah*. Berikut beberapa ketentuannya:

1. Tidak tercantumnya unsur *gharar* (ketidakjelasan).
2. Tidak menentang dengan ajaran perspektif Islam, contoh: berbisnis menggunakan barang yang dilarang atau diharamkan oleh syariat Islam.
3. Didalam Al-Qur'an dianjurkan apabila akan melakukan suatu perjanjian waralaba diharuskan secara tertulis dengan tulisan yang jelas.
4. Tidak adanya unsur yang dilarang oleh syariat Islam, misalnya *riba*, *ikhhtikar*.
5. Bisnis yang mengandung masalah/manfaat.

B. Syirkah

Syirkah merupakan perjanjian yang dilaksanakan dengan dua orang atau lebih yang sedang melakukan

kontrak meliputi pengelolaan dan pengumpulan modal, keuntungan serta kerja dan presentase nya akan ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan. Rukun pada akad *syirkah* ini yaitu sebagai berikut:

1. Dengan adanya *shigat* atau ijab kabul yang harus diungkapkan oleh para pihak yang berakad untuk membuktikan kejelasan dalam rencana yang ada pada kontrak yang sudah dibuat.
2. Modal yang diserahkan diharuskan berupa uang tunai, dan modal yang dikeluarkan oleh para anggota harus terbuka agar sama jenisnya supaya tidak terdapat keunggulan tersendiri.
3. Pihak yang diberikan kewenangan agar wajib berkompeten supaya tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan.

Menurut Hanafiyah berikut syarat-syarat yang berkaitan dengan akad *syirkah*:

1. Pihak mitra mempunyai kewajiban dan hak yang sama maka dari itu semua yang melakukan perikatan dalam bentuk *syirkah* harus berkompeten dalam sesuatu yang akan diadakan dan sebagai pertanggungan.
2. Semua yang akan melakukan akad *syirkah*, salah satu syaratnya ialah adanya modal. Modal yang akan dijadikan akad *syirkah* dalam pembayarannya harus jelas baik sama jumlahnya ataupun berbeda.
3. Apabila bisnis berjalan maka harus merupakan hasil kesepakatan semua pihak dalam pembagian keuntungan sifatnya harus transparan (terbuka) satu sama lain tidak boleh sampai adanya perbedaan ataupun yang ditutupi.
4. Dalam penyerahan modal agar bisa diadakan maka dalam modal tersebut harus mempunyai kesamaan karena apabila terdapat perbedaan modal maka modal tersebut tidak dapat diikutsertakan pada akad. maka *syirkah* ini tidak bisa dinamakan dengan *al-mufawadhah* karena *syirkah mufawadhah* disyaratkan dengan modal (pokok harta) itu harus sama.

C. Syirkah Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *al-rihb* yang artinya keuntungan. Secara istilah *syirkah mudharabah* ini ialah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) yang keuntungannya dibagi dengan nisbah yang telah disepakati.

Qiyas merupakan salah satu hukum yang membolehkan *mudharabah* dengan mengqiyaskan transaksi untuk mendapat pembagian hasil yang sama rata.

Ada beberapa prinsip-prinsip *mudharabah* yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip Pembagian Keuntungan

Pembagian hasil ini tidak boleh dibagikan dahulu sebelum ada kerugian yang sudah tertutup dan pengembalian modal seluruhnya kembali.

b. Prinsip Pembagian Kerugian

Apabia terjadi kerugian, maka yang bertanggung jawab

pemilik modal kecuali terjadi kelalaian ada pada pihak pengelola.

c. Prinsip Kejelasan

Sebelum melakukan akad perjanjian *mudharabah*, dalam perjanjian tersebut harus ditegaskan dengan jelas dan bentuk perjanjian tersebut harus secara tertulis.

d. Prinsip Kepercayaan dan Amanah

Pemilik modal harus mempercayakan seluruhnya kepada pengelola modal karena apabila pemilik modal tidak percaya maka tidak akan terjadi transaksi akad *mudharabah*.

e. Prinsip Kehati-hatian

Dalam akad *mudharabah* mempunyai prinsip kehati-hatian itu menjadi dasar dan harus dipunyai oleh orang-orang yang akan melakukan akad baik dari pemilik modal maupun dari pengelola.

Menurut Rachmat Syafe'I, berikut hal yang membatalkan akad *mudharabah*:

- Orang yang berakad meninggal dunia
- Mengalami gangguan jiwa dari satu pihak
- Pemilik modal keluar dari Islam (Murtad)
- Hilangnya modal ditangan pengelola
- Salah satu pihak mengundurkan diri.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syirkah Mudharabah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Syirkah mudharabah dalam konteks fiqh muamalah yaitu perikatan kerjasama yang menyertakan dua pihak yaitu orang yang memiliki modal menyerahkan modalnya pada seseorang didasari rasa kepercayaan untuk mengelola modal tersebut untuk dijadikan suatu usaha. Akad ini diperbolehkan asal terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. Sebagaimana terkandung dalam kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى

تَحْرِيمًا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Fiqh telah menetapkan beberapa ketentuan yang ada hubungannya dengan syirkah mudharabah yaitu sebagai berikut: a) modal, mensyaratkan bahwa dalam modal mata uang harus yang berlaku, modal sepenuhnya diserahkan kepada pengelola saat melakukan kontrak, Jumlah dan jenisnya modal harus sesuai. b) Manajemen, dalam kontrak mudharabah, ketika akad dilakukan maka pihak pemodal tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur manajemen usaha. c) Jaminan, dalam berakad mudharabah mengenai hal ini tidak memberikan adanya jaminan atas modal yang sudah diserahkan pada pengelola yang ada hanyalah tingkat kejujuran yang tinggi.

B. Praktik Akad Syirkah Mudharabah Pada Kemitraan Bisnis Franchise Kebab Turki Baba Rafi Cabang Buah Batu

Perjanjian kontrak yang diterapkan Kebab Turki Baba

Rafi yaitu dengan melibatkan perkumpulan kelompok untuk melakukan kerjasama. Dengan menerapkannya sistem akad mudharabah yang mana pihak Kebab Turki Baba Rafi menyerahkan izinnya kepada franchise yang bergabung untuk memakai hak atas kekayaan intelektual seperti pendayagunaan brand dagang sampai sistem manajemen operasionalnya. Jangka waktu perjanjian franchise yaitu 5 tahun.

Kebab Turki Baba Rafi Cabang Buah Batu dalam pembagian hasilnya menggunakan sistem *payback period*. *Payback period* merupakan waktu yang digunakan untuk kembalinya modal menggunakan penghasilan bersih diterima dalam waktu 1.8 tahun diawal perjanjian yang telah disepakati. Tetapi dalam praktiknya, sistem *payback period* ini malah membuat ketidakjelasan antara pembagian hasil dengan pengembalian modal karena pada sistem yang diterapkan pihak mitra untuk perhitungan dalam jangka waktu 1.8 tahun tersebut pihak mitra yang sudah menikmati bagi hasil sedangkan franchise hanya menerima pengembalian modal.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Akad Syirkah Mudharabah Pada Sistem Kemitraan Bisnis Franchise Kebab Turki Baba Rafi Cabang Buah Batu

Berdasarkan data lapangan, praktik yang dilakukan Kebab Turki Baba Rafi dengan penerapan sistem *payback period* bertentangan dengan konsep *mudharabah* karena selama 1.8 tahun diawal perjanjian, yang diuntungkan hanyalah pihak mitra karena dalam waktu tersebut pihak mitra sudah menikmati keuntungan yang diperoleh sedangkan *franchise* dalam jangka waktu tersebut hanya menerima modal awal. Hal ini bertentangan dengan konsep *mudharabah* karena dalam konsep *mudharabah* pihak pengelola modal wajib terlebih dahulu untuk mengembalikan modal atau harta kepada pihak *franchise* lalu ditambah sebagian dari keuntungan yang diperoleh. Maka, dari jangka waktu perjanjian *franchise* selama 5 tahun *franchise* akan mendapatkan keuntungan setelah seluruh modalnya kembali yaitu kurang lebih 3.2 tahun.

Mengenai sistem *payback period* yang diterapkan dalam Kebab Turki Baba Rafi apabila dianalisis dengan konsep *mudharabah* ada beberapa perbedaan diantaranya yaitu:

- Dalam perjanjian mengenai nisbah yang dilakukan Kebab Turki Baba Rafi tidak terdapat tawar menawar diawal perjanjian sedangkan dalam akad *mudharabah* diawal perjanjian terdapat adanya tawar menawar.
- Didalam sistem *payback period* 1.8 tahun yang diterapkan Kebab Turki Baba Rafi menganggap bahwa dalam waktu tersebut modal dalam bentuk bagi hasil untuk *franchise* sudah kembali tetapi lain menurut konsep *mudharabah* untuk pembagian hasilnya dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan modal seluruhnya pada pihak *franchise*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan teori dan hasil analisis mengenai Analisis *Syirkah Mudharabah* Pada Kemitraan Bisnis *Franchise* Kebab Turki Baba Rafi Outlet Buah Batu dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Akad *syirkah mudharabah* dalam fiqh muamalah hukumnya diperbolehkan asalkan terpenuhinya rukun, syarat yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak ada dalil yang melarangnya.
2. Praktik akad *syirkah mudharabah* pada kemitraan bisnis *franchise* Kebab Turki Baba Rafi untuk pembagian keuntungan menggunakan sistem *payback period* yang mana dalam jangka waktu 1.8 tahun pihak Kebab Turki Baba Rafi sepenuhnya mendapatkan keuntungan sedangkan pihak *franchise* dalam jangka waktu tersebut hanya menerima pengembalian modal.
3. Analisis fiqh muamalah terhadap implemantasi *syirkah mudharabah* pada bisnis *franchise* Kebab Turki Baba Rafi dalam sistem *payback periodnya* membuat ketidaksesuaian dengan syarat keuntungan yang diterapkan dalam konsep *mudharabah* karena adanya ketidaksamaan dalam pembagian keuntungan. Pihak *franchise* akan mendapatkan keuntungan setelah seluruh modalnya kembali yaitu kurang lebih 3.2 tahun.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang sudah dipaparkan pada sebelumnya, maka ada beberapa saran yang penulis akan sampaikan yaitu:

1. Saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini khususnya untuk mitra Kebab Turki Baba Rafi dalam pembagian keuntungan seharusnya sesuai dengan konsep *mudharabah* agar menghindari terjadinya kerugian diantara salah satu pihak karena bisa menimbulkan hilangnya kepercayaan para *franchise*.
2. Dalam melakukan perjanjian harus ada unsur keterbukaan atau transparan baik dari pihak *mudharib* maupun pihak *shahibul al-maal*, agar tidak terjadi kesalahpahaman antar kedua belah pihak.
3. Agar selalu mengutamakan prinsip keadilan sehingga terciptanya hubungan bisnis yang damai antara *franchisor* dan *franchise* serta untuk memperoleh ridho Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam Panji, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika

Aditama, 2018)

- [2] *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis, Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- [3] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- [4] Muslihah- Al, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul-Haq, 2013)
- [5] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (Jakarta: Kencana, 2010)
- [6] Saripudin Udin, 'Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah', *Ekonomi Dan Bisnis*, 4.2503–4413 (2016), 63–79
- [7] Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori Konsep Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Econesia, 2017)
- [8] Syirfana, Ramdaniar Eka., Nurhasanah, Neneng., Ibrahim, Mohamad Andri. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 26-31.